

**ANALISIS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PESISIR BUKIT
KOTA SUNGAI PENUH**

**NIKO DEFRIZA, S.AP¹,
ANTRI MARIZA QADARSIH, S.Sos., M.Si², YARNUM, S.Sos., M.Si³**

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

nikodefriza5@gmail.com

antrimarisaqodrsih@gmail.com

yarnum@gmail.com

ABSTRACT

Niko Defriza, NPM 1410078201360, "Analysis of Subdistricts Development in the Acceleration of Development in the Coastal Districts of Sungai Penuh City".

This study aims to determine the Division of Subdistricts in the Acceleration of Development in the District of Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, using data collection techniques through field studies namely conducting direct interviews in the Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Subdistrict and literature studies by reading documents related to the problem under study look for concepts, theories, opinions or findings related to the main problem.

Based on the results of the study, it was concluded, regarding the Subdivision of Subdistricts in the Acceleration of Development in Pesisir Bukit Subdistrict Sungai Sungai City The sub-district government is very concerned with the community and serves with a heart, because the government is essentially a servant to the people, with the pemekran can reduce the accumulation of administrative files in the office sub-district so that. The fruits of democracy are prosperity and society has the right to get a better life then the government must also pay attention to the community. The sub-district government has instructed the community to maintain security and order for the sake of mutualbenefit.

Keywords: Expansion, Development Acceleratio

ABSTRAK

Niko Defriza, NPM 1410078201360, “Analisis Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, tentang Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Pemerintah kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani dengan sepenh hati, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, dengan adanya pemekran bisa mengurangi penumpukan berkas administrasi dikantor kecamatan sehingga. Buah dari demokrasi adalah kesejahteraan dan masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik kemudian dari pada itu pemerintah juga wajib memperhatikan masyarakat. Pemerintah kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kebaikan bersama.

Kata Kunci : Pemekaran, Percepatan Pembangunan

I. PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan pembangunan dengan cepat serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pasca reformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran justru mengalami kemunduran. Demokratisasi berpemerintahan hanya bisa di laksanakan jika diberikan hak otonom terhadap suatu daerah.

Dengan adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan itu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah lalu dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. Otonomi menjadi tumpangan bagi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatannya hingga ketingkat desa, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak dalam suatu pemekaran.

Disisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perangkat hukum dan perundangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih., memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Hal inilah yang mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran Kecamatan pemerintahan diloloskan. Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan fokus dalam proses berpemerintahan sebagai hal utama. Pemekaran kecamatan dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran kecamatan juga merupakan bagian dari upaya untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.

Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut. Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat di bandingkan desa/kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat, di manasesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat pada heterogenitas (keanekaragaman) dan kompleksitas (keruwetan) permasalahan dan urusan yang di hadapi. Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Secara historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya.

Masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa dengan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang Camat. Dalam rangka Era Otonomi Daerah pada saat ini, Kecamatan Pesisir Bukit sebagai Lembaga Pemerintahan dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai pelayanan. Oleh karena itu Kecamatan Pesisir Bukit, sangat membutuhkan percepatan Pembangunan Yang benar-benar mampu, berdaya guna, dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Pesisir Bukit. Untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana yang dimaksud di atas maka perlu adanya percepatan pembangunan/Infrastruktur yang ada di kecamatan Pesisir bukit dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dugaan sementara yang menjadi Fenomena dalam penelitian ini adalah :

Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran kecamatan merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Kurangnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Pesisir Bukit dalam mensejahterakan masyarakat

Pelayanan yang kurang terhadap masyarakat

Kurangnya rekrutman tenaga honorer pada kantor kecamatan Pesisir Bukit

Dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang “Analisis Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh” yang kemudian lebih ditindak lanjuti kedalam sebuah judul skripsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kaulitatif. Sebagaimana metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiono (2011:79) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Masyarakat

Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan dan inti dari pemekaran Kecamatan Pesisir Bukit untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya sehingga peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan sarana prasana serta infrastruktur yang memadai.

Pengelolaan Potensi Daerah

untuk mengelola potensi suatu daerah Diperlukan sebuah strategi kolaborasi yang baik antar masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan dalam menggagas berbagai program pemberdayaan demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pola pendekatan pun harus berlahan lahan di ubah tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik tetapi lebih menggali potensi yang ada dan memprioritaskan ke pembangunan sumber daya lokal tentu hal ini tidak hanya kesiapan dari pemerintah kecamatan pesisir bukit saja tetapi seluruh elemen harus dilibatkan agar Pengelolaannya sangat bagus dan terkendali, selama masyarakat dan pemerintah kecamatan bisa berkerja sama meningkatkan pendapatan masyarakat dan melayani masyarakat dengan baik.

Kehidupan Demokrasi

Buah dari demokrasi adalah kesejahteraan dan masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik kemudian dari pada itu pemerintah juga wajib memperhatikan masyarakat.

Kehidupan Masyarakat

bahwa pemekaran suatu daerah sebagai bentuk mengejar ketertinggalan suatu daerah dan mempunyai peluang untuk di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan itu sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat baik itu pelayanan publik, pembangunan dan ekonomi namun didalam pembangunan pasti menimbulkan dampak baik yang positif maupun negative tetapi sebagai kecamatan baru tentu banyak yang harus ditingkatkan dalam pembangunan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat memang saat ini masyarakat kecamatan pesisir bukit belum sepenuhnya merasakan dampak dari pembangunan yang bersifat fisik karena masih dalam proses pembangunan.

Keamanan Dan Ketertiban

pemerintah kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kebaikan bersama.

Pelayanan Masyarakat

pemerintah kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani dengan sepeleh hati, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, dengan adanya pemekaran bisa mengurangi penumpukan berkas administrasi dikantor kecamatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehidupan Masyarakat setelah adanya pemekaran kecamatan dalam percepatan pembangunan, pemekaran suatu daerah sebagai bentuk mengejar ketertinggalan suatu daerah dan mempunyai peluang untuk di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan itu sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat baik itu pelayanan publik, pembangunan dan ekonomi namun didalam pembangunan pasti menimbulkan dampak baik yang positif maupun negative tetapi sebagai kecamatan baru tentu banyak yang harus ditingkatkan dalam pembangunan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat memang saat ini masyarakat kecamatan pesisir bukit belum sepenuhnya merasakan dampak dari pembangunan yang bersifat fisik karena masih dalam proses pembangunan.
2. Perekonomian Masyarakat setelah adanya pemekaran kecamatan dalam percepatan pembangunan, Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan dan inti dari pemekaran Kecamatan Pesisir Bukit untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya

sehingga peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan sarana prasana serta infrastruktur yang memadai.

3. Pengelolaan Potensi Daerah setelah adanya pemekaran kecamatan dalam percepatan pembangunan, untuk mengelola potensi suatu daerah Diperlukan sebuah strategi kolaborasi yang baik antar masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan dalam menggagas berbagai program pemberdayaan demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pola pendekatanpun harus berlahan lahan di ubah tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik tetapi lebih menggali potensi yang ada dan memprioritaskan ke pembangunan sumber daya local.tentu hal ini tidak hanya kesiapan dari pemerintah kecamatan pesisir bukit saja tetapi seluruh elemen harus dilibatkan agar Pengelolaannya sangat bagus dan terkendali, selama masyarakat dan pemerintah kecamatan bisa berkerja sama meningkatkan pendapatan masyarakat dan melayani masyarakat dengan baik.
4. Buah dari demokrasi adalah kesejahteraan dan masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik kemudian dari pada itu pemerintah juga wajib memperhatikan masyarakat.
5. Pemerintah kecamatan telah mengintruksikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kebaikan bersama.
6. Pemerintah kecamatan sangat peduli kepada masyarakat dan melayani dengan sepeleh hati, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, dengan adanya pemekran bisa mengurangi penumpukan berkas administrasi dikantor kecamatan sehingga

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Khususnya kepada Kedua Orang Tuaku tercinta, dan Seluruh Keluargaku yang telah memberikan Do'a, baik Moril maupun Materil dan segala pengorbanannya dan semangat dalam penyusunan Skripsi.
2. Ibu Antri Marisa Qadarsih, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Yarnum, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih banyak .
4. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi, arahan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan arahan dan kritikan yang bersifat

konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang budiman, demi kesempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Alison dan Jarice Hanson, 2009, *Taking Sides: Mass Media and Society*, Tenth Edition, New York, The McGraw – Hill.
- Deddy T. Tikson. 2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi.<http://ecozone.html>. Diakses pada : Senin, 18 April 2011
- Ginanjar, Kartasmita, 1994 : *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDES INDO, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005
- Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratak usumah 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gedung Agung, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Hukum Kostitusi Bandung* : Pustaka Setia
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah
- Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah
- Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah